

Hasbullah, S.S

MODAL ACEH UNTUK REPUBLIK

*Filantropi Aceh untuk Indonesia
(1945-1949)*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
(Wilayah Kerja Provinsi Aceh - Sumut)

ISBN 978-602-9457-91-9



Seri Informasi Sejarah

No. 68/2019

***Modal Aceh untuk Republik:
Filantropi Aceh untuk Indonesia
(1945-1949)***

Hasbullah, S.S

Editor

Drs. Mawardi Umar, M.Hum., M.A

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
2019**

Modal Aceh untuk Republik:
Filantropi Aceh untuk Indonesia (1945-1949)
Hasbullah, S.S
v + 23 hlm 14,8 x 21 cm
ISBN: 9-78902-457919

Judul
Modal Aceh untuk Republik:
Filantropi Aceh untuk Indonesia (1945-1949)

Hasbullah
Copyrights ©2019 BPNB Aceh

Editor
Drs. Mawardi Umar, M.Hum., M.A

Cover
Angga, S.Sos.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp/Faks. : +62651 – 23226
[http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh)
email: bpnbbandaaceh@yahoo.com

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Seri Informasi Sejarah ini sehingga diterbitkan. Seri Informasi Sejarah *Modal Aceh untuk Republik: Filantropi Aceh untuk Indonesia (1945-1949)* ini mengisahkan proses kembalinya Belanda ke Indonesia hingga terjadi agresi Belanda pertama dan kedua serta bagaimana filantropi Aceh yang sangat signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Filantropi masyarakat Aceh terhadap Republik Indonesia penting diketahui oleh generasi muda Aceh untuk melihat peran Aceh pada masa lalu sehingga dirasa perlu untuk disusun dalam Seri Informasi Sejarah. Hal ini merupakan salah satu upaya BPNB Aceh untuk penanaman karakter jati diri bangsa Indonesia dengan mendokumentasikan aspek sejarah, yaitu peristiwa yang telah terjadi di Aceh.

Seri Informasi Sejarah ini mengisahkan filantropi Aceh dalam sumbangsihnya bagi Republik Indonesia yang dulu dipelopori oleh pemuda dan tokoh masyarakat Aceh. Filantropi Aceh pada Republik Indonesia disusun sejak kemerdekaan 1945 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949.

Seri Informasi Sejarah ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada nilai-nilai sejarah filantropi Aceh pada Republik Indonesia di masa lalu sehingga menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda Aceh di masa kini untuk memahami integrasi dalam NKRI dan untuk menanamkan karakter cinta pada tanah air seperti yang telah dilakukan masyarakat Aceh di masa lalu.

Untuk itu, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Seri Informasi Sejarah ini. Semoga bermanfaat.

Banda Aceh, 2019
Kepala BPNB Aceh

Irin Dewanti, S.S., M.SP
NIP 197105231996012001

PENGANTAR EDITOR

Dengan tidak menafikan pentingnya periode lain, periode revolusi kemerdekaan merupakan periode yang sangat penting artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Periode ini merupakan puncak dari perjuangan panjang yang telah dilakukan bangsa Indonesia dalam upaya memperoleh kebebasan dari dominasi kolonialisme dan imperialisme. Diawali dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menurut Sukarno merupakan jembatan emas menuju kebebasan, dilanjutkan dengan aktivitas mempertahankan kemerdekaan selama tiga setengah tahun ke depan.

Realitasnya memang demikian, meski telah memperoleh jembatan emas, ternyata bangsa Indonesia tidak dengan mulus dapat menikmati alam kebebasan, karena Belanda yang merasa sebagai penguasa atas wilayah Indonesia sebelumnya menempuh berbagai cara untuk mengembalikan kekuasaannya. Upaya Belanda tersebut mendapat resistensi dari rakyat Indonesia di berbagai daerah, sehingga terjadi konflik sampai Desember 1949, saat diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Selama konflik tersebut, hampir seluruh wilayah republik berhasil dikuasai kembali oleh Belanda, kecuali Aceh.

Sebagai satu-satunya wilayah republik yang tidak pernah berhasil dikuasai kembali oleh Belanda pasca Perang Dunia II, kecuali Sabang, peran Aceh cukup sentral dalam periode ini. Aceh telah menjelma menjadi benteng terakhir pertahanan republik dari ancaman pasukan Belanda. Dengan kebebasan yang dimiliki, Aceh telah menjadi tumpuan hampir segala harapan republik dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih “seumur jagung” tersebut. Asa ini mendapat sambutan positif dari hampir seluruh rakyat Aceh. Mereka dengan sukarela tetap bersama dan berkontribusi nyata terhadap Republik, sebagaimana telah diulas dengan sangat baik dalam booklet ini.

Dengan peran yang sangat amat penting yang dimainkan oleh rakyat Aceh tersebut, maka tidak berlebihan apabila Sukarno dalam pidato di lapangan Explanade (Blang Padang) tahun 1947 memberi julukan Aceh sebagai “Daerah Modal” bagi republik. Ironisnya, karya historiografi yang sudah diproduksi tentang Aceh pada periode ini belumlah sebanding dengan kontribusi itu sendiri. Hal ini berimplikasi

terhadap tidak masuknya narasi filantropi rakyat Aceh masa revolusi dalam buku-buku teks sekolah, yang berakibat banyak generasi muda baik nasional maupun Aceh banyak yang tidak mengetahui realitas historis tersebut. Dengan jarak yang semakin hari semakin jauh dari peristiwa sangat dikhawatirkan pengetahuan tentang fakta historis tersebut akan hilang dari memori masyarakat.

Sebenarnya terdapat beberapa buku teks yang pernah diproduksi tentang Aceh pada periode ini yang sebagian besar berupa dalam bentuk monografi dan memoir yang ditulis pelaku sejarah sendiri. Akan tetapi, dengan terjadinya perubahan paradigma generasi milineal saat ini ke hal-hal yang lebih *instant*, semua karya historiografi tersebut menjadi kurang menarik bagi mereka. Booklet ini menjadi salah satu alternatif yang sangat baik untuk mengisi kekosongan historiografi tentang Aceh bagi generasi milenial tersebut. Selain disusun dengan ulasannya yang ringkas dan lugas, gaya penulisan booklet ini yang cenderung populer sehingga sangat sesuai dengan selera generasi milenial.

Banda Aceh, November 2019
Editor,

Drs. Mawardi Umar, M. Hum., M.A

PENGANTAR PENULIS

Segala peristiwa dari seluruh aktivitas manusia di masa lalu yang sudah terjadi dalam dimensi ruang dan waktu pasti meninggalkan jejak. Jejak peristiwa tersebut merupakan sumber sejarah. Sejarah adalah pelajaran bagi manusia yang mau introspeksi, berpikir, karena di setiap peristiwa yang terjadi menjadi pedoman bagi mereka untuk bertindak lebih bijak dan arif di hari ini dan agar dapat melangkah ke masa dengan penuh keyakinan. Dengan demikian, sejarah adalah guru atau pedoman menjalani kehidupan bagi manusia.

Sejarah lokal memuat peristiwa yang terjadi di tingkat lokal dari waktu ke waktu. Tentu saja setiap peristiwa bersejarah di daerah itu memiliki relevansi dengan nilai-nilai baik dan untuk menghindari kesalahan sehingga menjadi sumber pelajaran yang berharga bagi masyarakat pada hari ini untuk menyongsong masa depan mereka.

Seri Informasi Sejarah ini mengungkapkan fakta tentang bagaimana filantropi Aceh untuk Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Pada saat itu semangat masyarakat Aceh sangat menggelora, dan itu menjadi modal bagi Indonesia hingga penyerahan kedaulatan dari Belanda pada akhir 1949.

Seri Informasi Sejarah ini patut diketahui generasi muda Aceh agar lebih arif dan bijak serta objektif terhadap sejarah Aceh di masa lalu sehingga tidak menjadi sesat pikir ketika memahami berbagai episode dalam dinamika sejarah Aceh. Sejarah integrasi Aceh ke Indonesia sejak awal kemerdekaan diwarnai berbagai dinamika terkait politik, ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu perlu kearifan dan kebijaksanaan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat membawa Aceh semakin maju menjadi lebih baik, lebih gemilang dan lebih hebat.

Banda Aceh, November 2019
Penulis

Hasbullah, S.S

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BPNB ACEH	i
PENGANTAR EDITOR	ii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	v
BAGIAN I	
PENDAHULUAN	1
BAGIAN II	
BELANDA MEMBONCENG SEKUTU KE INDONESIA	3
BAGIAN III	
KONTRIBUSI ACEH DALAM MENGHADAPI	
AGRESI MILITER BELANDA I DAN II	6
BAGIAN IV	
FILANTROPI MASYARAKAT ACEH MEMBANTU JALANNYA SISTEM	
PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA	8
BAGIAN V	
KUNJUNGAN PRESIDEN SOEKARNO KE ACEH DAN PERMOHONAN	
PEMBELIAN PESAWAT UDARA	10
BAGIAN VI	
FILANTROPI ACEH DALAM PEMBELIAN	
PESAWAT UDARA INDONESIA	14
BAGIAN VII	
FILANTROPI RADIO KUTARAJA DAN RADIO RIMBA RAYA	
MENYELAMATKAN REPUBLIK INDONESIA DI MATA DUNIA	18
BAGIAN VIII	
PENUTUP	22
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAGIAN SATU PENDAHULUAN

Kisah sejarah ini tidaklah dimaksudkan untuk ‘mendirikan benang basah’ dan bukan juga untuk ‘mencuci kotoran yang telah kering’. Tulisan ini disusun untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda khususnya generasi milenial di Aceh untuk mengetahui bagaimana peran pemuda dan golongan tua Aceh dulu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peran sejarah sangat penting untuk melihat dan menilai dinamika hubungan Aceh dengan pemerintah pusat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga saat ini. Episode sejarah ini menjadi penting dilirik kembali agar dapat menghindari sengkarut perjalanan sejarah Aceh yang terjadi di masa lalu, terutama dinamika politik antara daerah dengan pemerintah pusat yang dimulai sejak peristiwa DI/TII Aceh 1953 hingga 1962, dan kemudian lahirnya Gerakan Aceh Merdeka 1976-1998 yang bermuara pada penerapan darurat militer dan darurat sipil sejak 2000-2005, hal ini menjadi pembelajaran untuk masa sekarang dan yang akan datang.

Sebagaimana kata pepatah, “cinta pada tanah air adalah bagian dari iman”. Begitu kata sebagian kaum muslim yang merupakan masyarakat mayoritas di Aceh. Pada masyarakat Aceh konsep cinta tanah air ini berkolerasi dengan konsep *‘tueng bila’* atau “bela diri” yang melekat pada setiap orang Aceh ketika membela diri, keluarga, agama dan bangsanya. Mereka benci pada segala bentuk dan tindakan penindasan dan penjajahan yang berlawanan dari nilai kebenaran dan nilai kemanusiaan. Semangat inilah yang dulu terus digelorakan oleh

pemimpin Aceh, baik oleh ulama, bangsawan sehingga karena konsistensi mereka dalam perjuangan menjadikan Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia, khususnya pada periode 1945-1949.

Aceh adalah paling terakhir ditaklukkan setelah Sultan Aceh Muhammad Daud Syah menyerah tahun 1903, dan paling awal ditinggalkan oleh Belanda tahun 1942. Hal itu dikarenakan adanya pendudukan tentara Jepang di Aceh. Mereka pada saat itu mengobarkan semangat 'saudara tua' dengan 'Gerakan 3A'; Jepang (*Nippon*) Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia.

Sejak saat itu daratan Aceh tidak pernah lagi dikuasai oleh Belanda. Hal ini pula yang menyebabkan Aceh menjadi satu-satunya wilayah Republik Indonesia kecuali Sabang, yang masih utuh sampai pada saat penyerahan atau pengakuan kedaulatan Indonesia di Den Haag oleh Belanda pada akhir 1949.

BAGIAN II

BELANDA MEMBONCENG SEKUTU KEMBALI KE INDONESIA

Keinginan Belanda kembali ke Indonesia dilakukan NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang membonceng Sekutu kembali ke Indonesia. Belanda hendak meneruskan kembali hegemoni mereka di Indonesia. Keinginan mereka diwujudkan dalam dua serangan agresi militer, yaitu agresi pertama (*operatie product*) atas pulau Jawa dan Sumatera tahun 1947, dan agresi kedua (*operatie kraai* atau operasi gagak) pada 19 Desember 1948 atas pulau Jawa dan Sumatera.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebelum ditangkap oleh Belanda pada 18 Desember 1948 sudah memberikan mandat pada Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Kepala Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat sejak 22 Desember 1948. PDRI ini berlangsung hingga 13 Juli 1949.

Pada saat itu, daerah Aceh yang tersisa dan menjadi satu-satunya modal Republik Indonesia melawan Belanda. Hal itu secara faktual seperti yang menjadi judul pidato Presiden Soekarno ketika menggelorakan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kutaraja, Sigli, dan Bireuen.

Pidato kebangsaan Presiden Soekarno itu pertama kali dilontarkan dalam rapat raksasa di bekas lapangan Explanade Kutaraja (Blang Padang, Banda Aceh) 17 Juni 1948 yang diteruskan di Sigli dan Bireuen untuk membakar semangat Aceh membantu republik yang

tinggal selebar payung karena agresi Belanda. Tidak berselang lama, para pemimpin Republik Indonesia ditangkap Belanda. Presiden Soekarno bersama Haji Agus Salim saat itu dibuang ke Berastagi, lalu dipindahkan ke Parapat di Sumatera Utara.

Sampai kini, permasalahan ini ternyata masih menjadi perdebatan sengit terutama di dalam diskusi publik ketika membahas periode ini dalam sejarah Aceh. Sering terjadi debat kusir di kalangan peminat sejarah lokal Aceh, seperti yang terlihat di media sosial *facebook* grup di Atjeh Gallery dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat terutama generasi milenial belum mengetahui proses integrasi Aceh ke republik. Selain itu, sebagian lagi masyarakat Aceh masih ada yang mengklaim sejarah integrasi Aceh dengan Republik Indonesia pada periode tersebut hanyalah melibatkan segelintir tokoh dan tidak merepresentasikan seluruh masyarakat Aceh.

Sebagian masyarakat yang gemar pada literasi sejarah, lebih arif menanggapi integritas Aceh ke dalam Republik Indonesia karena merupakan fakta sejarah, di mana sumbangsih atau filantropi Aceh ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar, terutama dalam menghadapi masa-masa sulit pada saat agresi pertama dan kedua Belanda atas ibu kota negara, Jakarta hingga ibu kota kemudian berpindah ke Yogyakarta sampai masa akhir Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 1949.

Filantropi rakyat Aceh sudah dibuktikan sejak awal kemerdekaan 1945 hingga pembentukan PDRI di Bukittinggi Sumatera Barat sejak 19 Desember 1948 hingga pada saat Mr. Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri. Namun PDRI resmi dibubarkan dengan keluarnya Undang Undang No.2/1949

tanggal 30 September 1949 tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri di Sumatera.

Penempatan Wakil Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara di Kutaraja pada tahun 1949 menunjukkan kepada dunia bahwa secara *de facto* wilayah kekuasaan Republik Indonesia masih tetap berdiri, dan tidak pernah seluruhnya berhasil dikuasai kembali oleh Belanda.¹

Syafrudin Prawiranegara tiba di Kutaraja pada 23 Agustus 1949 bersama Menteri Agama K.H. Masykur. Syafrudin Prawiranegara yang berkedudukan di Kutaraja diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri untuk melaksanakan pemerintahan mewakili pemerintah pusat. Kutaraja pun ditetapkan sebagai pusat pemerintahan.²

Di Aceh, upacara penyerahkan kedaulatan dari Belanda kepada RIS dilakukan oleh Molenaar pejabat Asisten Residen Belanda di Sabang pada tanggal 28 Januari 1950. Penyerahan kedaulatan itu diserahkan pada Zaini Bakri, Bupati Aceh Besar RIS yang disaksikan oleh Taris dari pihak Belanda dan Kapten Nukum komandan TNI di Sabang dan Dutamiharja dari pihak RIS.³

¹Mr. S.M. Amin, *Kenang-Kenangan di Masa Lampau*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, hlm.79

²Abdullah Ali, *et.all*, 1984, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, hlm.334.

³*Ibid*.hlm. lamp.

BAGIAN III

KONTRIBUSI ACEH DALAM MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA I DAN II

Di Aceh pada agresi Belanda masih tersedia berbagai sarana komunikasi, pers, dan radio. Semua perangkat ini masih berfungsi dengan baik. Dengan begitu, siaran pers melalui radio mempermudah koneksi Aceh dengan daerah lainnya serta antara pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hal itu ada karena daerah Aceh memang tidak pernah berhasil dikuasai lagi Belanda, setelah Jepang masuk dan meninggalkan Aceh.

Namun bukan berarti pada saat agresi Belanda, daerah Aceh tidak pernah diserang mereka. Belanda sering melakukan serangan melalui udara maupun laut. Pusat-pusat pertahanan pasukan Aceh, seperti Lhoknga, Ujongbate (Aceh Besar), Uleelheue Kutaraja (Banda Aceh), Lhokseumawe (Aceh Utara) dan beberapa tempat lainnya di pesisir timur dan barat Aceh sering diujani serangan Belanda. Namun, serangan-serangan Belanda tersebut semua dapat dipatahkan oleh seluruh angkatan bersenjata dan laskar yang ada di daerah Aceh.⁴

Aceh menjadi 'secul daerah' di Republik Indonesia yang sistem pemerintahannya masih eksis. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada Aceh dapat memperbaiki dan membangun saluran komunikasi, pers dan radio karena melalui media massa itulah pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan yang pertama ke daerah

⁴S.M Amin, *Ibid.* hlm. 103.

lain di Republik Indonesia yang sedang menghadapi agresi Belanda.⁵

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara Aceh dengan daerah lain di Republik Indonesia karena pada saat itu Aceh masih dapat menggunakan media massa, sarana pos, telegram dan telepon. Perangkat media massa ini sudah dikenal di Aceh pada masa kolonial Belanda sehingga dapat berperan sangat penting pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Melalui media ini berita-berita tentang keberadaan Republik Indonesia dapat disampaikan secara praktis tanpa perantara. Keberadaan telegram tersebut membuat daerah Aceh lebih percaya diri dalam rangka membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sedang berjuang melawan agresi Belanda. Bukan hanya itu, pemerintah di Aceh juga berhasil mengirimkan pasukan bersenjata dari Aceh ke Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda di Medan Area dan sekaligus juga sangat penting sekali untuk menjaga pertahanan wilayah Aceh sendiri.

⁵Hardi, *Daerah Istimewa Aceh-Latar Belakang dan Masa Depan* Jakarta : Perpustakaan Nasional, 1993, hlm. 118.

BAGIAN IV

FILANTROPI MASYARAKAT ACEH MEMBANTU JALANNYA SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah pusat yang pada awalnya berkedudukan di Jakarta, namun setelah agresi pertama terpaksa berpindah ke Yogyakarta. Pada saat itu situasi perbendaharaan dan keuangan negara belum dapat membiayai seluruh kebutuhan daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan situasi pemerintah RI yang baru terbentuk. Selain itu, banyak permasalahan terutama terkait situasi politik pada masa transisi. Oleh sebab itu, permasalahan ekonomi masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Selain itu, pihak Belanda masih berusaha mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dengan melakukan blokade di bidang ekonomi.

Menjaga stabilitas dan keadaan negara yang baru saja terbentuk menjadi prioritas utama pemerintah pusat. Persoalan pemerintah pusat saat itu lebih diarahkan pada upaya mempertahankan kemerdekaan RI, sehingga di bidang ekonomi sangat dipengaruhi oleh upaya dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kondisi dan situasi yang demikian membuat pemerintah daerah Aceh terpaksa membuat dan mengeksekusi kebijakannya sendiri untuk dapat membiayai pemerintahan di

daerahnya. Bahkan daerah Aceh juga bersedia membantu pemerintah pusat.

Gubernur Muda Sumatera Utara S.M. Amin mengatakan, “tidak dapat disangkal kenyataan bahwa daerah Aceh semenjak permulaan perjuangan kemerdekaan itu senantiasa berdiri di atas kaki sendiri, tidak memperoleh perbelanjaan dari pusat. Daerah Aceh adalah satu-satunya daerah yang di masa perjuangan kemerdekaan tidak pernah diduduki musuh, tidak pernah memperoleh perbelanjaan dari pusat, namun pada saat segenting-gentingnya ketika hampir seluruh Indonesia dikuasai musuh, sebaliknya Aceh pernah membelanjai pemerintah pusat di Yogyakarta selama lebih kurang tiga setengah bulan. Pada tahun 1949 saja, bantuan itu bernilai S\$ 500.000.⁶

Pada saat itu sumber pendapatan daerah Aceh diperoleh dari sektor perdagangan, perkebunan, dan pertambangan. Sumber perdagangan pada masa ini adalah kegiatan ekspor berbagai jenis komoditi perkebunan dari Aceh dengan menggunakan armada perahu motor ke Malaysia dan Singapura. Usaha ini sebenarnya masih terlalu berbahaya karena blokade yang sangat ketat dari angkatan laut Belanda di Samudera Indonesia dan perairan Selat Malaka.

Kesuksesan di bidang perdagangan internasional dengan luar negeri pada masa itu tentu saja mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sedangkan risikonya pun sangat besar. Apabila tertangkap Belanda hal ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi pengusaha. Komoditi ekspor ke Malaysia dan Singapura

⁶Mr. S.M.Amin, *Op.Cit*, hlm,102.

itu dapat dibarter dengan tekstil, senjata, dan perlengkapan lainnya.⁷

Pengusaha Aceh yang memainkan peranan penting dalam kegiatan perdagangan pada masa itu antara lain, Muhammad Saman dari Firma Puspa, Wahi Ibrahim dari N.V. Permai, Alibasyah dari Firma H.M. Tawi & Son, Teuku Djohan dari Meuraxa Trading Coy, dan lain-lain.

BAGIAN V

KUNJUNGAN PRESIDEN SOEKARNO KE ACEH DAN PERMOHONAN PEMBELIAN PESAWAT UDARA

Daerah Aceh yang tidak pernah lagi dikuasai Belanda merupakan modal utama Republik Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan menghadapi Belanda. Pernyataan ini didukung dengan fakta, bahwa Aceh satu-satunya daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu itu tidak pernah diduduki lagi oleh Belanda kecuali Sabang.⁸ Hal ini pula yang menjadikan Aceh sebagai filantropi utama utusan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda. Bahwa Republik Indonesia masih ada dan masih memiliki wilayah yang bebas dari penguasaan Belanda, yaitu Daerah Aceh.

Ucapan Presiden Soekarno itu berhubungan dengan berbagai filantropi yang telah diberikan rakyat Aceh pada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk sumbangan

⁷*Ibid*, hlm.261

⁸ S.M. Amin, *Ibid*, hlm. 102.

pesawat udara. Antusiasme rakyat Aceh dalam membantu pembelian pesawat udara Indonesia ini dibuktikan dengan kerelaan seluruh rakyat untuk membuka pintu rumahnya saat didatangi panitia hingga malam hari. Mereka mau menyumbangkan sebagian emas atau barang berharga milik mereka lainnya demi mempertahankan Republik Indonesia.

Permohonan pembelian pesawat diawali kunjungan Presiden Soekarno pada tanggal 15 Juni 1948. Pada saat itu Presiden Soekarno mengunjungi Aceh bersama rombongan yang berjumlah 17 orang, gabungan dari sipil dan militer. Rombongan Presiden pada saat itu terdiri dari Dr. Soekiman (Menteri Dalam Negeri); Surjo, (Ketua Dewan Pertimbangan Agung); Mr. Teuku Muhammad Hasan, (Komisaris Negara Urusan Umum, Ketua Komisariat Sumatera); Prof.Dr. Asjikin, (dokter rombongan); Mr. Iksan, (Sekretaris Negara); Mayor Soegandi, (Ajudan Presiden); Moetaliar, (pegawai tinggi Sekretariat Negara); Toekimin, (pegawai menengah Sekretariat Negara); Said, (paman presiden); Hasanoeddin, (mertua presiden); Jenderal Mayor Soehardjo, (Panglima TNI Sumatera); Manoesang, (fotografer kepresidenan); Indarmara, (pegawai Komisariat Negara); Natsir Sutan Pamuntjak, (utusan Negara Republik Indonesia di Mesir) dan Soegiono, (opsir udara pertama). Pada saat itu rombongan mendarat di lapangan udara Lhoknga Aceh Besar.

Pada saat di Kutaraja (Banda Aceh) Presiden Soekarno berpidato, "Aceh adalah daerah modal perjuangan bangsa Indonesia". Pada saat itu surat kabar Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta mengabarkan hari Kamis 17 Juni 1948, "ratusan ribu rakyat Aceh, di antaranya enam ribu anak sekolah memadati jalan-jalan yang dilalui presiden yang mengelu-elukannya. Cinta

rakyat Aceh kepada presiden tergambar dari kemeriahan penyambutan ini”.⁹

Pada 15 Juni 1948 malam Presiden Soekarno menggelorakan semangat rakyat di Atjeh Bioskop Kutaraja. Saat itu dihadiri 800-an undangan. Sedangkan pada pagi harinya pada tanggal 16 Juni 1948, presiden mengadakan upacara dan memeriksa barisan besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) di lapangan Explanade yang sekarang menjadi lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Presiden Soekarno pada saat itu didampingi Panglima TNI Komando Teritorial Sumatera dan Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo Jenderal Mayor Teungku Muhammad Daud Beureueh, Panglima Divisi X Kolonel Husin Yusuf, dan Komandan Barisan Besar Kolonel H.Sitompul. Setelah upacara selesai digelar dilangsungkan ‘rapat raksasa’ bersama masyarakat Aceh yang dihadiri ratusan ribu orang.¹⁰

Saat itu Presiden Soekarno berpidato, “Berikan kepadaku 1.000 pemuda, 10.000 orang tua, 100.000 orang tua, 1 milyar orang tua, aku dapat memindahkan Pulau Weh sampai ke daerah tanah Jawa. Tetapi berikan kepadaku 1000 pemuda, 100 pemuda, 10 pemuda tetapi hatinya yang betul-betul berkobar dengan api kemerdekaan, dengan 10 pemuda ini aku akan menggemparkan dunia”.¹¹

Pada tanggal 17 Juni 1948, Presiden Soekarno bertolak ke Sigli (Pidie) dari Kutaraja (Banda Aceh).

⁹“Presiden di Tengah Rakyat”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: Kamis, 17 Juni 1948.

¹⁰Surat kabar *Semangat Merdeka*, Kutaraja, Nomor Khusus, “Kedatangan Presiden Ke Aceh, hlm.,30-36.

¹¹ Abdullah Ali, et.all., *Op.Cit*, hlm.291

Sampai di Sigli, Presiden Soekarno bersama rombongan makan siang di kediaman Bupati Pidie, Teungku Abdul Wahab. Setelah makan siang Presiden Soekarno beserta rombongan bertolak ke lapangan Kuta Asan untuk menghadiri rapat raksasa bersama rakyat Sigli. Dalam rapat itu Presiden juga menggelorakan semangat masyarakat Pidie untuk mendukung Republik Indonesia.

Setelah rapat raksasa itu Presiden Soekarno dan rombongan bertolak ke Bireuen. Di Bireuen pada pagi harinya Presiden Soekarno menyapa rakyat Bireuen di Bioskop Murni. Pada malam harinya Presiden Soekarno juga membakar semangat rakyat Bireuen di bekas lapangan terbang Cot Gapu. Massa Bireuen yang hadir diperkirakan sebanyak 100.000-an orang. Bahkan ada yang datang dari Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Presiden Soekarno pada malam harinya sempat menyaksikan pertunjukan kesenian di rumah Kolonel Husen Yusuf. Selanjutnya, keesokan harinya tanggal 19 Juni 1948 Presiden Soekarno dan rombongan kembali ke Kutaraja (Banda Aceh) dan kembali ke ibu kota negara di Yogyakarta setelah mengatakan pertemuan dengan para pengusaha Aceh yang tergabung dalam GASIDA di Hotel Atjeh.¹²

¹²*Ibid.*

BAGIAN VI

FILANTROPI ACEH MENGGALANG DANA UNTUK PEMBELIAN PESAWAT UDARA INDONESIA

Setelah kunjungan Presiden Soekarno ke tiga daerah di Aceh, di sana dipaparkan kesulitan negara Republik Indonesia saat itu dalam menembus kepungan Belanda dan untuk memajukan hubungan antarpulau di Indonesia, maka Presiden Soekarno mengharapkan agar setiap residen membentuk Dakota Fond untuk dapat merealisasi dana pembelian pesawat Dakota.

Tokoh pejuang, pengusaha, dan beberapa pemuda Aceh terus berupaya menyumbang dana pesawat udara yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran perjuangan. Pengumpulan dana itu ditugaskan kepada Residen Aceh, Teuku Muhammad Daudsyah untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat c/q Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Yogyakarta.

Pada akhir Agustus 1948, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem sebagai Ketua Panitia pembelian pesawat udara telah menerima surat dari Residen Aceh yang bertanggal 28 Agustus 1948, dan sebuah telegram

bertanggal 23 Agustus 1948, No. 3470/KSU/48 yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera. Ternyata, uang yang sumbangan rakyat Aceh jumlahnya dapat membeli dua buah pesawat Dakota. Namun sisa dana dari Aceh untuk pembelian sebuah pesawat lagi masih diselimuti misteri hingga saat ini.

Tokoh Aceh Ali Hasjmy menyebutkan penyelewengan dana pembelian pesawat yang satu lagi saat itu terjadi di Singapura. Dalam telegram telah disebutkan kiriman uang yang diterima sebanyak dua kali, pertama berjumlah S\$ 120.000,- dan yang kedua uang berjumlah S\$ 140.000.¹³

Ketua Panitia pengumpul dana Dakota Fond, Teuku Panglima Polem Muhammad Ali juga menulis dalam memoirnya, "Seharusnya pemerintah perlu memberikan klarifikasi resmi terkait nasib sebuah pesawat terbang lagi, karena hal ini berhubungan dengan kebenaran dan pelurusan sejarah".¹⁴ Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pesawat yang satunya lagi telah dihadiahkan kepada pemerintah Burma (Myanmar) sebagai tanda terima kasih Republik Indonesia atas segala fasilitas yang telah diberikan untuk perwakilan Garuda yang beroperasi di sana.¹⁵

Pesawat dengan Nomor Register RI-001 itu oleh Presiden Soekarno diberi nama "Seulawah RI-001" akhirnya benar-benar mendarat di Kutaraja (Banda Aceh)

¹³Ali Hasjmy dalam Seminar Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949", Banda Aceh 17-20 Maret 1983., Ali Hasjmy menyebutkan mengetahui ke mana uang itu menghilang, namun beliau tidak berkenan untuk mengungkapkannya. Lihat hal ini dalam Abdullah Ali, *Ibid*, hlm.295.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵A.K. Jakobi, 1985, *Aceh Daerah Modal*, Jakarta : Yayasan Seulawah RI-001., dan lihat juga dalam *ibid*, hlm. 297

pada 28 Oktober 1948. Beberapa perwakilan pengusaha Aceh yang tergabung dalam GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) diundang oleh pemerintah pusat untuk dapat terbang bersama ke Burma (Myanmar), dan ke India. Kepala Staf Angkatan Udara, Komodor Surya Dharma mengajak terbang beberapa pengusaha Aceh sebagai tanda terima kasih kepada masyarakat Aceh.

Pesawat Dakota ini pada awalnya digunakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Rute pesawat ini terbang dari Indonesia ke Rangoon, Burma (Myanmar) dan Calcutta, India. Sedangkan untuk dalam negeri, pesawat ini berfungsi sebagai jembatan udara antarpulau Sumatera dan Jawa serta untuk menerobos blokade Belanda dalam menerbangkan tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Sejak tanggal 26 Januari 1949, RI-001 menjadi pesawat komersil yang digunakan oleh *Indonesian Airways*. *Indonesian Airways* kemudian dikenal dengan nama Garuda Indonesia.¹⁶

Filantropi Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia lainnya adalah dalam mengirimkan persenjataan, makanan, pakaian, dan lain-lain untuk merebut Kota Medan di Sumatera Timur (Sumatera Utara) dari Belanda. Pada tahun 1948, masyarakat Aceh yang diwakili Teuku Muhammad Ali Panglima Polem telah mengirimkan sebanyak 72 ekor kerbau ke Medan Area. Bantuan kerbau ini diterima oleh Letkol Hasballah Aji, Ketua Komando Sektor Barat Oetara (KSBO) pada tanggal 17 Januari 1948.¹⁷

¹⁶Amran Zamzami, *Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera 1945-1950* Jakarta: Pengurus Persatuan Eks Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera, 1985, hlm. 278.

¹⁷Abdullah Ali, *Op. Cit.*, hlm.278.

Selain itu filantropi masyarakat Aceh juga dalam bentuk dana untuk Misi Haji Republik Indonesia II ke Mekah Arab Saudi pada September 1949. Misi Haji ini dilakukan untuk mencari dukungan luar negeri sebagai pengakuan internasional bagi pemerintah Indonesia.

Susunan Misi Haji yang dibiayai dana dari masyarakat Aceh tersebut, adalah; Ketua, Teungku Syakh Abdul Hamid Samalanga, Sekretaris Teungku Muhammad Nur el Ibrahimy, Anggota-anggota yang terdiri dari Ali Hasjmy, Prof. Kahar Muzakkir (Yogyakarta), Syekh Awab Syahbal (Solo) dan Haji Syamsir (Jakarta).¹⁸

¹⁸Abdullah Ali, *Op.Cit*, hlm.129-131.

BAGIAN VII
FILANTROPI RADIO KUTARAJA DAN RADIO RIMBA
RAYA MENYELAMATKAN REPUBLIK INDONESIA
DI MATA DUNIA

Belanda melancarkan agresi pertama ke seluruh pelosok tanah air Indonesia pada 21 Juli 1947. Pada saat itu lapangan terbang Lhoknga juga diserang secara besar-besaran oleh Belanda melalui udara dan laut oleh Belanda juga ke daerah-daerah pantai lainnya di timur dan barat Aceh. Namun mereka tidak berani kembali menguasai Aceh.

Pada saat itu daerah di luar Aceh hampir seluruhnya telah dikuasai oleh Belanda. Pada masa inilah peran Radio Kutaraja semakin bertambah penting kedudukannya sebagai sarana komunikasi. Di samping Radio Kutaraja, angkatan perang atau Divisi Gajah atau Divisi X atas nama Pemerintah Daerah Aceh dalam keadaan kritis berhasil mendirikan sebuah pemancar yang lebih kuat jangkauan siarannya. Radio ini dikenal dengan nama Radio Rimba Raya.

Melalui Radio Kutaraja dan Radio Rimba Raya yang sama-sama sangat berperan dalam rangka mengobarkan semangat perjuangan kepada para prajurit

di daerah-daerah gerilya ketika mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Radio Kutaraja memberi semangat kepada para pejuang yang berada di lini depan, maupun kepada masyarakat untuk memberi sumbangan untuk pembiayaan perang di daerah Aceh serta daerah-daerah sejauh jangkauan siarannya diterima di wilayah Indonesia.¹⁹

Filantropi rakyat Aceh menyelamatkan bangsa Indonesia pada masa mempertahankan kemerdekaan adalah melalui media komunikasi Radio Rimba Raya. Sejak masa awal perang kemerdekaan pada tahun 1946, Aceh memiliki sebuah pemancar radio yang ditempatkan di Kutaraja. Dalam perkembangannya, pada tahun 1947 ditambah sebuah lagi transmisi yang ditempatkan di Kabupaten Bener Meriah (Kabupaten Aceh Tengah sampai 2002) yang dikenal dengan nama Radio Rimba Raya. Kedua radio ini memegang peranan yang cukup besar pada masa perang kemerdekaan sehingga sarana ini dapat dikatakan sebagai filantropi Aceh bagi perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan.²⁰

Radio Kutaraja (Banda Aceh) adalah Radio Republik yang pertama kali mengudara 11 Mei 1947 dengan kekuatan 25 Watt pada Gelombang 68 meter dengan jangkauan siaran sekitar Kutaraja (Banda Aceh). Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1947, radio ini dinaikkan menjadi 100 watt, sehingga jangkauan siarannya hingga ke Medan, Sumatera Utara dan Bukittinggi Sumatera Barat sebagai ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) kala itu.

¹⁹Amran Zamzami, *Op.Cit.*, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 353.

Pada April 1948, Radio Republik Indonesia Kutaraja dinaikkan lagi frekuensinya 325 Watt yang mengudara melalui Gelombang 33,5 meter. Siarannya dapat menjangkau hingga ke luar negeri. Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) bersidang tentang permasalahan pertikaian Republik Indonesia dengan Belanda, radio ini secara berulang-ulang mengadakan siaran tentang keinginan dan tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.²¹

Radio Rimba Raya sangat berbeda dengan Radio Republik Indonesia Kutaraja (Banda Aceh), di mana pemancar Radio Rimba Raya mempunyai kekuatan yang sangat besar, yaitu 1 Kilowatt. Radio Rimba Raya dikelola oleh Divisi X TNI yang dipimpin Mayor John Lie.²² Pemancar radio ini pada awalnya dipasang di Krueng Simpo, di pedalaman Bireuen. Jaraknya ketika itu sekitar 20 Km ke Takengon, ibu kota Aceh Tengah.

Perintah dari Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureueh, radio itu agar memindahkan ke Cot Gue (Kutaraja). Radio Rimba Raya ini kemudian dipindahkan lagi ke Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah) karena para pemimpin Aceh memperkirakan Belanda akan segera menyerbu. Radio Rimba Raya ini ditempatkan di Bur ni Bius dengan jarak 10 Km di barat Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam waktu yang singkat dan suasana yang semakin mendesak serta kebutuhan sarana komunikasi yang sangat mendesak, pemancar Radio Rimba Raya selesai dikerjakan W.Schultz keturunan Indonesia-Jerman

²¹Abdullah Ali, *Op.Cit*, hlm. 116.

²²Amran Zamzami, *Op. Cit.*, hlm.411.

bersama rekan-rekannya. Saat itu, pemancar radio utama di berbagai kota di Indonesia sudah tidak mengudara lagi, karena dikuasai Belanda. Radio Rimba Raya menjadi 'pahlawan' dalam mengisi 'udara hampa' itu sehingga berhasil menepis berita dan *hoax* Belanda.²³

Saat Radio Batavia dan Hilversum memberitakan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi setelah Yogyakarta berhasil direbut yang disusul jatuhnya daerah kekuasaan Republik Indonesia lainnya. Peran Radio Rimba Raya saat itu sangat besar karena konsisten dalam menyangkal berita dan *hoax* Belanda dan upaya melawan berita Radio Batavia dan Hilversum.

Radio Rimba Raya kontinyu mengabarkan berita: "Republik Indonesia masih ada, Tentara Republik Indonesia masih ada, Pemerintah Republik Indonesia masih ada, dan wilayah Republik Indonesia masih ada. Di sini Aceh, salah satu wilayah Republik Indonesia yang masih utuh sepenuhnya". Siaran dari Radio Rimba Raya ini kemudian diteruskan oleh *All India Radio* sehingga dunia mengetahui berita *hoax* Belanda tentang kondisi dan situasi Republik Indonesia pada saat itu.²⁴

²³T.A. Talsya, 1990, *Modal Perjuangan Kemerdekaan, Perjuangan Kemerdekaan di Aceh*, Banda Aceh : Lembaga Sejarah Aceh, hlm.69

²⁴ *Ibid.*

BAGIAN VIII

PENUTUP

Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang sangat setia pada republik. Masyarakat Aceh merupakan daerah yang sangat nyata filantropinya ketika mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Daerah ini pun tidak dapat dikuasai lagi oleh Belanda sejak 1942 dan merupakan satu-satunya daerah yang utuh dalam Republik Indonesia hingga penyerahan kedaulatan atau pengakuan kemerdekaan oleh Belanda dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, pada 27 Desember 1949 di Den Haag, Belanda.

Filantropi Aceh secara faktual ada dalam sumbangsihnya pada Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga saat-saat darurat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh tampil di panggung sejarah.

Filantropi Aceh itu tidak hanya berupa dukungan jiwa dan raga, tetapi moral maupun material dikerahkan untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat bela bangsa telah menjadi jati diri orang Aceh sehingga mereka mampu terus berjuang di Jalan Allah yang menjadi modal utama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Aceh.

Gelora perang sabil di Aceh juga mampu membakar semangat perjuangan masyarakat Aceh dalam melawan segala bentuk penindasan sehingga mereka mampu bertahan dan terus berjuang hingga ke tujuan demi mencapai kesejahteraan dan kedamaian abadi dalam kebersamaan tanpa meniscayakan keberagaman Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Ali, *et.all*, 1984, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949*, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh.
- A.K. Yakobi *Proklamasi Kemerdekaan RI dan Peranan Teuku Hamid Azwar sebagai Pejuang*, Jakarta: Gramedia., 1998, *Aceh dalam Mempertahankan*
- A.K. Jakobi, 1992, *Aceh Daerah Modal* Jakarta : Yayasan Seulawah RI-001.
- Amran Zamzami, 1985, *Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera 1945-1950* Jakarta: Pengurus Persatuan Eks Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera
- Hardi, 1993, *Daerah Istimewa Aceh-Latar Belakang dan Masa Depannya* Jakarta : Perpustakaan Nasional.
- T.A. Talsya, 1990, *Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan kemerdekaan di Aceh*, Banda Aceh : Lembaga Sejarah Aceh.
- Teuku Ibrahim Alfian, 1982, *Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945-1949)*, Banda Aceh: Proyek Permuseuman Daerah Istimewa Aceh.
- S.M. Amin, 1978, *Kenang-Kenangan di Masa Lampau*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- T.P. Panitia Penerbitan *Boekoe Peringatan Satoe Tahoen NRI di Soematera 17-8-1945 - 17-8-1946*, Penerbitan Pemerintah Poesat Soematera.

- V. Sardjono dan GL. Marsadji, 1982, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)-Penyelamat Negara dan Bangsa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Tintamas, Sumatera.